



**Dinas**  
**pmp****ptsp****Kalsel**

**BERGERAK !!!**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)  
GUBERNUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**JALAN BANGUN PRAJA KAWASAN PERKANTORAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Selatan,

**Ir. H. NAFARIN, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620513 198903 1 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Bab I     Pendahuluan .....	1
Bab II    Isu Strategis Organisasi .....	2
Bab III   Urusan Desentralisasi .....	4
A. Program dan Kegiatan .....	4
B. Tingkat Pencapaian Standar Minimal Pelayanan .....	6
C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	6
D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib/Pilihan .....	21
E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	22
F. Alokasi dan Realisasi Anggaran .....	24
G. Proses Perencanaan Pembangunan .....	32
H. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (Lengkap, Kurang, Mencukupi atau Lainnya) .....	34
I. Permasalahan dan Solusi .....	39
J. Prestasi/Penghargaan yang Diraih .....	40
K. Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan .....	41
Bab IV    Dekonsentrasi .....	42
Bab V     Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan .....	44
Bab VI    Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Tahun 2018 .....	46
Bab VII   Penutup .....	54
Lampiran .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2018 .....	7
Tabel 3.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	22
Tabel 3.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan .....	23
Tabel 3.4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional .....	24
Tabel 3.5.	Laporan Konsolidasi Bulanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2018 .....	25
Tabel 3.6.	Kondisi Sarana dan Prasarana .....	34
Tabel 4.1.	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 .....	42
Tabel 6.1.	Tataran Pengambil Kebijakan .....	46
Tabel 6.2.	Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Hubungan Visi dan Misi .....	33
------------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Daerah / SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis dalam 5 tahun mendatang dan Permengari Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang melayani urusan terkait investasi dan pelayanan terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016. Bahwasanya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kegiatan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta agar mampu eksis dan berhasil dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dan mengantisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

## **BAB II**

### **ISU STRATEGIS ORGANISASI**

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014) dan 3,84% (2015)
2. Investasi di kalsel, s.d. tahun 2014 masih relative menarik, terutama di sektor tambang
3. Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui:
  - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
  - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
  - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
  - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Dari permasalahan tersebut, melalui Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari DPMPTSP Provinsi

Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Belum teridentifikasinya data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pelayanan belum optimal;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. Kurangnya sarana dan prasarana;
11. Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan dan akuntabilitasnya dapat lebih dijamin;
12. Keterbatasan Anggaran.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan



## **BAB III**

### **URUSAN DESENTRALISASI**

#### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri dari 4 (empat) program rutin (kesekretariatan) dan 3 (tiga) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
7. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.

Dari program tersebut di atas, dijabarkan menjadi kegiatan. Adapun kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
  - b. Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - d. Penyediaan jasa Administrasi keuangan
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- l. Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
    - m. Penataan Perpustakaan
    - n. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
  - a. Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
  - a. Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - c. Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
  - a. Pengembangan dan pemberdayaan usaha
  - b. Penyelenggaraan pameran investasi
  - c. Identifikasi peluang dan potensi investasi daerah
  - d. Forum kawasan industri Kalimantan Selatan
  - e. Evaluasi pelaksanaan RUPM
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
  - a. Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi

- b. Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal
- 7. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan:
  - a. Sosialisasi perizinan se Kalsel
  - b. Rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait dan kab/kota se Kalsel
  - c. Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian perizinan
  - d. Evaluasi dan sertifikasi standar pelayanan SMM berbasis ISO 9001
  - e. Pelayanan penanaman modal.

## **B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL PELAYANAN**

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2018 yakni **peningkatan investasi**. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp9,2 triliun dengan peningkatan sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat B (nilai 80) serta indikator tambahan berupa nilai persetujuan investasi (rencana investasi) sebesar Rp10,6 triliun. Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2018

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp9.200.000.000.000	Rp11.705.813.900.000
2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	15%	86,16%
3	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	10.600.000.000.000	21.750.612.100.000
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (80)	A (82.61)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 4 (empat) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2018, DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar 9,2 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **11,7 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **127,73%**.

Pada indikator Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN ditargetkan meningkat 15%. Adapun realisasinya adalah sebesar **86,16%**, sehingga kinerja mencapai **574,4%**.

Pada indikator Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi ditargetkan sebesar 10,6 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **21,7 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **205,19%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan B dengan nilai 80. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 82,61**, sehingga kinerja mencapai **103,26%**.

Pada tahun 2017, target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tidak tercapainya target peningkatan realisasi investasi tahun 2017 disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadi pergeseran (*shifting*) sektor usaha dari hulu ke hilir. Sektor-sektor pertambangan dan perkebunan tidak menjadi prioritas lagi dan beralih ke sektor hilirisasi industri
2. Kurangnya pengembangan pembangunan infrastruktur dasar, seperti listrik, jalan, air dan lainnya.
3. Kondisi Politik (menjelang Pilpres 2019).

Indikator DPMPSTSP (DPMPSTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 9,2 triliun rupiah dan peningkatan sebesar 15%.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar 11,7 triliun rupiah atau 127,73% dari target dan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 86,16%. Realisasi investasi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun angka tersebut yakni mencapai 21,8 triliun rupiah yang meningkat sekitar 74% dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan investasi:

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi
6. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
7. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 132 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission* (OSS)
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Menuju ISO 9001:2015.

Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2018, DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

**I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan kesekretariatan)**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan Kegiatan :**

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- Penyediaan alat tulis kantor kinerja/fisik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 98,12%, dengan kegiatan :**

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 95,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%



- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%**, dengan kegiatan :
  - Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 95,00%**, dengan kegiatan :
  - Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal dengan realisasi kinerja (fisik) 95,00% dengan hasil 6 dokumen perencanaan dan pelaporan.
  - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi kinerja (fisik) dengan realisasi kinerja (fisik) 95,00% dengan hasil 1 dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

## **II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal**

### **1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program ini dilaksanakan oleh DPMPTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.836.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.687.656.900,-,- atau 94,76% dan realisasi fisik sebesar 98,19%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

#### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.487.100.000 . Serapan keuangan sebesar Rp1.445.651.700,00 atau 97,21% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya 1 orang Pengelola Pameran dan Kemitraan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
- 2) Terlaksananya kegiatan koordinasi ke BKPM RI

- 3) Terpasangnya baliho promosi investasi di 2 media promosi, berlokasi di Jakarta dan bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
- 4) Mengikuti beberapa pameran investasi di dalam negeri, yaitu:
  - a) IVEC Batam 2018 di Batam pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018
  - b) JITTEK Expo 2018 di Yogyakarta pada tanggal 11 April 2018 sampai dengan 14 April 2018
  - c) IFATEX Expo 2018 di Bandung pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan 22 April 2018
  - d) Gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2018 di Kuta pada tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan 13 Mei 2018
  - e) MIATTEX EXPO 2018 di Medan pada tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018
  - f) Palembang Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo 2018 (PIATTEX) di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018
  - g) Kalsel Expo di Banjarbaru pada tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018
  - h) Batu Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo 2018 (BIATTEX) pada tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018.
- 5) Prestasi/ penghargaan yang diraih antara lain:
  - a) Stand terbaik IVEC Batam 2018
  - b) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi JITTEK Expo 2018
  - c) Juara I stand terbaik Bidang Informasi Investasi IFATEX Expo 2018
  - d) Juara I stand terbaik Gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2018
  - e) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi MIATTEX EXPO 2018

- f) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi PIATTEX 2018
- g) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi BIATTEX 2018.

**b. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp320.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp280.459.300,00 atau 87,64% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan UMKM yang ada di Provinsi Bali: Iwan Sasirangan dengan CV. Cipta Amanah Busana, Iwan Sasirangan dengan Filo & Soefie, Hj. Nor Hikmah (Pengusaha Permata dan Batu-batuan) dengan Belanglicius, dan Hj. Nor Hikmah (Pengusaha Permata dan Batu-batuan) dengan Nelimung Accessories
- 2) Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 3 September 2018
- 3) Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dan CV. Sinar Teknik Mandiri pada acara Matchmaking antar Dunia Usaha di Malang pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018
- 4) Tersedianya rekapitulasi data UMKM Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- 5) Terlaksananya Rapat Koordinasi “Fasilitasi Kemitraan dalam Peningkatan Daya Saing di Kalimantan Selatan” bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta diikuti oleh PTSP

Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

**c. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RUPM**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp329.300.000 . Serapan keuangan sebesar Rp302.759.200,00 atau 91,94% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Pertama Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2018
- 2) Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Kedua Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 18 Juli 2018
- 3) Terlaksananya Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 16 Agustus 2018
- 4) Tersedianya buku Profil dan Potensi Daerah Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Selatan
- 5) Tersedianya buku Profil dan Potensi Kota Banjarmasin
- 6) Disusunnya naskah akademik Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2015.

**d. Kegiatan Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp490.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp460.808.200,00 atau 94,04% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya 1 orang Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
- 2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Promosi Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP

Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 1 Oktober 2018

- 3) Tersedianya spanduk promosi untuk berbagai acara selama 1 tahun
- 4) Tersedianya brosur promosi industri semen
- 5) Tersedianya brosur promosi penggemukan dan pembibitan sapi potong
- 6) Tersedianya brosur promosi rumput laut
- 7) Tersedianya brosur promosi budidaya ikan kerapu
- 8) Tersedianya brosur promosi industri pengolahan ikan air tawar
- 9) Tersedianya brosur promosi kawasan industri batulicin
- 10) Tersedianya brosur promosi kawasan industri jorong
- 11) Tersedianya brosur promosi pariwisata loksado
- 12) Tersedianya brosur promosi wisata susur sungai
- 13) Tersedianya dokumen Identifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Potensial untuk Meningkatkan Kemitraan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Indonesia Banjarmasin
- 14) Tersedianya dokumen Identifikasi Potensi Investasi Daerah Kalimantan Selatan yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Indonesia Banjarmasin.

**e. Kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp210.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp197.978.500,00 atau 94,28% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn - Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2018 yang dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari:

- 1) Pejabat struktural di Kementerian terkait;

- 2) Pejabat SKPD teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4) Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- 5) Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- 6) Duta Besar Negara sahabat;
- 7) Investor; dan
- 8) Praktisi.

## **2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 973.943.400,- atau 92,76% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

### **a. Kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp505.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp474.297.750,00 atau 93,92% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force serta adanya tindak lanjut permasalahan hasil pengawasan
- 2) Terlaksananya Rapat Pembinaan Perusahaan PMA/PMDN Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 16 November 2018

### **b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp545.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp499.645.650,00 atau 91,68% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya buku Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2017

- 2) Terlaksananya Rapat Pertama Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2018
- 3) Terlaksananya Rapat Pertama Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2018
- 4) Terlaksananya Rapat Kedua Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 20 September 2018
- 5) Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP 8 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Balangan
- 6) Terlaksananya updating data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
- 7) Terlaksananya belanja jasa tenaga ahli pembuatan aplikasi digital signature oleh PT. Afsar Primula Solusindo dengan nilai kontrak Rp48.800.000
- 8) Terlaksananya Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Se Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 15 November 2018
- 9) Terlaksananya Launching SiMapan dan Penerapan Digital Signature pada Izin dan Non Izin Tahun 2018 bertempat di

Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru  
pada tanggal 23 November 2018

10) Diterapkannya digital signature pada Izin dan Non Izin Tahun  
2018.

### **3. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan**

Program ini dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.189.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.044.104.050,- atau 87,79% dan realisasi fisik sebesar 99,19%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

#### **a. Kegiatan Sosialisasi Perizinan se Kalsel**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp192.525.000 . Serapan keuangan sebesar Rp159.767.100,00 atau 82,99% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi perizinan perekonomian dan sosial untuk seluruh Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Selatan dengan materi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang disampaikan oleh Narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **b. Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp385.245.000 . Serapan keuangan sebesar Rp321.460.550,00 atau 83,44% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

1) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penerbitan Bidang produksi dan industri serta perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial.



- 2) Terlaksananya kegiatan rapat koordianasi dengan PT.ATA terkait perizinan izin pengguna jalan nasional.
- 3) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi PT.KEL terkait permohonan rekomendasi pembelokan sungai.
- 4) Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, atau konsolidasi perizinan.

**c. Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp201.600.000 . Serapan keuangan sebesar Rp196.296.000 atau 97,37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan perizinan bidang produksi dan industri serta perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial.

**d. Kegiatan Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp120.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp111.008.700,00 atau 92,51% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya audit/ sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001:2015 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 November 2018 (Stage 1) dan 6 s/d 7 Desember 2018 (Stage 2)
- 2) Diperolehnya Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirements untuk 7 pelayanan publik di bidang perizinan produksi dan industri pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

**e. Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp290.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp255.571.700,00 atau 88,13% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Fasilitas PM dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan PM Tahun 2018, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru.

- 2) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Sosialisasi Online Single Submission (OSS) Tahun 2018, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2018.

#### **D. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB/PILIHAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan produksi dan industri, dari tugas-tugas pokok tersebut dapat diketahui fungsi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat mebarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial; dan
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

#### **E. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 3.2

Tabel 3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	3	10	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	0	1	1	
7	Diploma Empat (D-IV)	1	-	1	
8	Sarjana (S-1)	21	7	28	
9	Sarjana (S-2)	10	5	15	
10	Sarjana (S-3)	-	-	-	
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	8	-	8	*)

2	Sarjana (S-1)	9	7	16	*)
	<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	
	<b>Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>79</b>	

Keterangan : \*) Pegawai Tenaga Kontrak

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel 3.3

Tabel 3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	5	2	7	
4	II/d Pengatur Tk.I	-	-	-	
5	III/a Penata Muda	7	-	7	
6	III/b Penata Muda Tk.I	9	5	14	
7	III/c Penata	6	5	11	
8	III/d Penata Tk.I	5	2	7	
9	IV/a Pembina	1	2	3	
10	IV/b Pembina Tk.I	5	-	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	6	1	7
4	Eselon IV.A	11	4	15
5	Fungsional Tertentu	2	1	3
6	Non Struktural / Fungsional Umum	19	10	29
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>55</b>

#### F. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp7.002.972.000 dan Belanja Langsung (BL) untuk pelaksanaan program kegiatan sebesar Rp9.467.474.200. Adapun realisasi anggaran sebesar 93,90,04% BL dan 91,49% BTL. Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 97,08%.

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Laporan Konsolidasi Bulanan  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2018

**DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Program / No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Dana	Realisasi	Serapan		Sisa Pagu
					Keuangan	Fisik	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<b>3.174.604.200</b>	<b>3.031.097.042</b>	<b>95.48</b>	<b>100.00</b>	<b>143.507.158</b>
	• <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Jumlah Dokumentasi pelayanan surat menyurat	24.000.000	18.251.000	76.05	100.00	5.749.000
	• <b>Penyediaan Jasa Telekomuni- kasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	487.908.200	463.407.192	94.98	100.00	24.501.008
	• <b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	Tersedianya jasa administrasi keuangan	198.000.000	194.690.000	98.33	100.00	3.310.000
	• <b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	Tersedianya jasa kebersihan kantor	230.000.000	229.513.800	99.79	100.00	486.200

	• <b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	70.000.000	69.901.500	99.86	100.00	98.500
	• <b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	80.000.000	79.722.100,00	99.65	100.00	277.900,00
	• <b>Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	36.000.000	35.987.000	99.96	100.00	13.000
	• <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	90.000.000	89.306.000	99.23	100.00	694.000
	• <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	342.000.000	267.605.600	78.25	100.00	74.394.400
	• <b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	Tersedianya makanan dan minuman	350.000.000	334.449.200	95.56	100.00	15.550.800
	• <b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar</b>	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani	790.000.000	778.388.150	98.53	100.00	11.611.850

	<b>Daerah</b>	secara tertib					
	• <b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	237.500.000	237.336.000	99.93	100.00	164.000
	• <b>Penataan Perpustakaan</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	58.856.000	58.777.500	99.87	100.00	78.500
	• <b>Penyediaan Jasa Teknis Perizinan</b>	tersedianya jasa teknis perizinan	180.340.000	173.762.000	96.35	100.00	6.578.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<b>665.000.000</b>	<b>625.009.590</b>	<b>93.99</b>	<b>98.12</b>	<b>39.990.410</b>
	• <b>Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	jumlah aset yang diadakan	70.000.000	69.300.000	99.00	100.00	700.000
	• <b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	150.000.000	148.458.000	98.97	100.00	1.542.000
	• <b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan</b>	Persentase penyediaan dokumen	250.000.000	214.161.500	85.66	95.00	35.838.500



	<b>Dinas/ Operasional</b>	terkait sarana dan prasarana					
	• <b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	70.000.000	69.788.000	99.70	100.00	212.000
	• <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</b>	jumlah aset yang diadakan	100.000.000	98.640.090	98.64	100.00	1.359.910
	• <b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	Jumlah aset yang diadakan	14.000.000	13.860.000	99.00	100.00	140.000
	• <b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	Jumlah aset yang diadakan	11.000.000	10.802.000	98.20	100.00	198.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		<b>200.000.000</b>	<b>194.360.050</b>	<b>97.18</b>	<b>100.00</b>	<b>5.639.950</b>
	• <b>Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi. dan Bimbingan Teknis PNS</b>	Persentase peserta pelatihan/ bimtek yang paham	200.000.000	194.360.050	97.18	100.00	5.639.950
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan,		<b>352.100.000</b>	<b>333.737.000</b>	<b>94.78</b>	<b>95.00</b>	<b>18.363.000</b>

	Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan						
	• <b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	15.600.000	15.600.000	100.00	100.00	0,00
	• <b>Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal</b>	jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	312.500.000	307.597.000	98.43	95.00	4.903.000
	• <b>Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	survey dan tersusunnya dokumen IKM	24.000.000	10.540.000	43.92	95.00	13.460.000
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		<b>2.836.400.000</b>	<b>2.687.656.900</b>	<b>94.76</b>	<b>98.19</b>	<b>148.743.100</b>
	• <b>Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha</b>	jumlah kemitraaan dunia usaha	320.000.000	280.459.300	87.64	100.00	39.540.700
	• <b>Penyelenggaraan Pameran Investasi</b>	jumlah pelaksanaan pameran investasi	1.487.100.000	1.445.651.700	97.21	100.00	41.448.300
	• <b>Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan</b>	persentase rekomendasi hasil forum yang ditindaklanjuti	210.000.000	197.978.500	94.28	95.00	12.021.500

	• <b>Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah</b>	jumlah sektor potensi investasi yang teridentifikasi	490.000.000	460.808.200	94.04	95.00	29.191.800
	• <b>Evaluasi Pelaksanaan RUPM</b>	evaluasi kebijakan PMPTSP dan RUPM yang ditindaklanjuti	329.300.000	302.759.200	91.94	95.00	26.540.800
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		<b>1.050.000.000</b>	<b>973.943.400</b>	<b>92.76</b>	<b>100.00</b>	<b>76.056.600</b>
	• <b>Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi</b>	jumlah perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya	505.000.000	474.297.750	93.92	100.00	30.702.250
	• <b>Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	persentase kab/kota yang telah menggunakan SIPID dan SIPIPISE terkait LKPM	545.000.000	499.645.650	91.68	100.00	45.354.350
7	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan		<b>1.189.370.000</b>	<b>1.044.104.050</b>	<b>87.79</b>	<b>99.19</b>	<b>145.265.950</b>

	• <b>Pelayanan Penanaman Modal</b>	persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan penanaman modal	290.000.000	255.571.700	88.13	100.00	34.428.300
	• <b>Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001</b>	ISO 9001	120.000.000	111.008.700	92.51	100.00	8.991.300
	• <b>Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan</b>	persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	201.600.000	196.296.000	97.37	100.00	5.304.000
	• <b>Rapat Koordinasi Perizinan Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel</b>	persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	385.245.000	321.460.550	83.44	100.00	63.784.450
	• <b>Sosialisasi Perizinan Se Kalsel</b>	jumlah pelaksanaan sosialisasi	192.525.000	159.767.100	82.99	95.00	32.757.900
	Total		<b>9.467.474.200</b>	<b>8.889.908.032</b>	<b>93.90</b>	<b>99.04</b>	<b>577.566.168</b>

## **G. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

**Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021** adalah :

**“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

**Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :**

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya bahwa untuk menjamin terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dibutuhkan 5 (lima) misi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Hubungan Visi dan Misi



Alur atau proses kegiatan pekerjaan dimulai dari Kepala Sub Bidang sebagai ujung tombak proses kegiatan dan PPTK yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang untuk koreksi selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat arahan dan persetujuan. Adapun tahapan proses perencanaan pembangunan DPMPTSP dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Rapat teknis bidang penanaman modal;
2. Membuat Renja Tahun 2018 mengacu ke RENSTRA SKPD di serahkan ke Bappeda Prov. Kalsel;
3. Proses Perencanaan oleh Bappeda untuk kegiatan Tahun 2018;
4. Pembuatan, pengusulan, dan penyampaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018;
5. Verifikasi Renja Awal RENJA-SKPD Tahun 2018;
6. Penerbitan Renja Akhir Melalui beberapa tahap penyempurnaan;
7. Pembahasan RKA-SKPD di serahkan ke Badan Keuangan Daerah dan pengesahan dari tim verifikasi;
8. Terbitnya DPA-SKPD Tahun 2018;
9. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahun 2018;
10. Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2018;
11. Usul Pembuatan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2018;
12. Pembahasan di Badan Keuangan Daerah oleh Tim verifikasi (Bappeda, Inspektorat)
13. Terbitnya DPPA-SKPD Tahun 2018;
14. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan DPPA-SKPD Tahun 2018.

**H. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCIKUPI ATAU LAINNYA)**

Kondisi sarana dan prasarana DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	KondisiBarang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung	1 unit		1 unit	
2	Mobil Dinas Roda 4 (Innova, Avanza, Suzuki)	11 Buah		11 Buah	4 Dari Pemprov, 7 Pengadaan Langsung

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	KondisiBarang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
	R-3)				
3	Sepeda Motor (Vixion, CBR, Supra, Vario dan Beat)	7 Buah		7 Buah	Pengadaan Langsung
4	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (Mesin Generator)	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
5	Alat Pemeliharaan Tanaman	1 Buah		1 Buah	Mesin Pemotong Rumput
6	Komputer	69 Buah	20 Buah	49 Buah	
7	Komputer unit/ Jaringan Lainnya	1 Buah		1 Buah	Server
8	Laptop	52 Buah		52 Buah	
9	Personal Komputer Lainnya	13 Buah		13 Buah	
10	Printer	56 Buah	16 Buah	40 Buah	
11	Scaner	2 Buah		2 Buah	
12	Peralatan Studio Visual	9 buah		9 Buah	kamera
13	Peralatan Studio Visual	8 Buah	8 Buah		UPS
14	Peralatan Studio Visual	11 Buah		11 Buah	Alat2 sound system
15	Peralatan Studio Visual	1 Set		1 Set	Kamera CCTV
16	Faxsimal	1 Buah		1 Buah	
17	Mesin Tik	8 Buah		8 Buah	
18	Camera DSLR	1 Buah		1 Buah	Merk Nikon
19	Kamera Digital	1 Buah		1 Buah	Merk Fujifilm
20	Proyektor	3 Buah		3 Buah	



No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	KondisiBarang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
21	Hardisk	1 Buah		1 Buah	
22	Filling Kabinet	63 Buah	5 Buah	58 Buah	
23	Almari Besi	20 Buah	4 Buah	16 Buah	
24	Kursi Kerja	41 Buah		41 Buah	
25	Meja Kerja	71 Buah		71 Buah	
26	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah		2 Buah	
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah		5 Buah	
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Buah		14 Buah	
29	Meja Rapat Pejabat	11 Buah		11 Buah	Ruang Kepala dan Aula
30	Kursi kerja Pejabat Eselon II	2 Buah		2 Buah	
31	Kursi kerja pejabat Eselon IV	18 Buah	5 Buah	13 Buah	
32	Kursi kerja diruang Pejabat Ess	78 Buah		78 Buah	
33	Kursi Tamu diruang Pejabat Ess	2 Set		2 Set	
34	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4 Buah		4 Buah	Lemari kayu kaca
35	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	39 Buah		39 Buah	Lemari besi
36	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4 Buah		4 Buah	Lemari besi kaca
37	Meja Fax	1 Buah		1 Buah	

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	KondisiBarang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
38	Meja Receptionis	1 Buah		1 Buah	
39	Meja Tambahan	1 Buah		1 Buah	Meja Kecil di Ruang Kepala
40	Bangku tunggu	7 Buah	1 Buah	6 Buah	
41	Sofa	9 Buah		9 Buah	
42	Rak TV	1 Buah		1 Buah	
43	AC	31 Buah	4 Buah	27 Buah	
44	Kipas Angin	10 Buah		10 Buah	
45	Kendaraan Roda 2	2 Buah		2 Buah	
46	Lemari Es	5 Buah		5 Buah	
47	TV	10 Buah		10 Buah	
48	Meubelair lainnya	1 Buah		1 Buah	
49	stabilizer	3 Buah		3 Buah	
50	Penyekat	1 Pasang		1 Pasang	
51	Alat Pengukur waktu	6 Buah		6 Buah	
52	Dispenser	4 Buah		4 Buah	
53	Peralatan Studio dan Film	1 Paket		1 Paket	
54	Peralatan Personal Komputer Lainnya (Flashdisk dan Tinta Botol)	28 Buah		Baik	Rusak
55	Brankas	2 Buah		2 Buah	
56	Papan Visual	1 Buah		1 Buah	
57	Alat Penghancur Kertas	2 Buah		2 Buah	
58	Lemari Kayu	13 Buah	4 Buah	9 Buah	

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	KondisiBarang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
59	Lemari Kaca	1 Buah		1 Buah	
60	Alat Penyimpanan Lainnya	2 Buah		2 Buah	Credensa Ruang Receptionis
61	Papan Nama Instansi	1 Buah		1 Buah	
62	Mesin Foto Copy	3 Buah		3 Buah	
63	Meja Rapat	27 Buah		27 Buah	
64	Kursi Rapat	84 Buah		84 Buah	
65	Telepon (Pabx)	1 Set		1 Set	Server
66	Sound System	1 Set		1 Set	
67	Alat Dapur	1 Set		1 Set	Rak piring dan peralatan dapur
68	Jam Mekanis	13 Buah	8 Buah	5 Buah	
69	Karpet	9 Buah	Rusak	Baik	di Ruang Musholla dan Ruang Kepala
70	Korden	1 Set		1 Set	
71	Kaca Bening	3 Buah		3 Buah	
72	Mesin Absensi	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
73	Alat Kantor Lainnya (Infocus)	3 Buah	2 Buah	1 Buah	2 buah rusak di Ruang Aula
74	Alat Kantor Lainnya (Partisi)	2 Buah		2 Buah	Ruang Kepala dan Rapat
75	Alat Kantor Lainnya (Wallpaper)	1 Buah		1 Buah	Ruang Kepala
76	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Buah	1 Buah		Alat Penyedot Debu
77	Alat Rumah Tangga Lainnya	8 Buah	8 Buah		UPS

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	KondisiBarang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
78	Alat Rumah Tangga Lainnya	2 Buah			Granit dan Backdroft
79	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Buah		1 Buah	Mesin pompa air

## I. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1. Permasalahan

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

Secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan belum optimal, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya dalam penanganan pelayanan.
- b. Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.
- d. SOP dan Flowchart dari SKPD yang melimpahkan wewenangnya, belum semuanya ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan karena terkendala adanya Peraturan Kementerian/Lembaga masing-masing SKPD.
- e. Tim Teknis tidak berada dalam satu tempat sehingga pihak PTSP harus menyampaikan kembali untu permintaan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan permohonan izin tertentu.
- f. Jaringan internet kurang optimal sehingga proses perizinan yang dilakukan secara online tidak sesuai dengan ketentuan SOP.

- g. Untuk perizinan disektor perikanan (izin kapal) dan disektor perhubungan (izin perpanjangan trayek yang menjadi kewenangan) proses perizinan sudah dilakukan secara online, maka bagi pemohon minimal harus mempunyai HP android agar dapat mengaksesnya.

## 2. Solusi

- a. Melengkapi beberapa permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun didaerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
- b. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.
- c. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
- d. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan, agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## J. PRESTASI/ PENGHARGAAN YANG DIRAIH

1. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Kategori Baik** tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Sertifikat SMM ISO 9001:2015.
3. Juara I Stand Terbaik Bidang Informasi Investasi Bandung IFATEC Expo 2018
4. Juara I Stand Terbaik Bali (Gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2018
5. Stand terbaik Bidang Informasi Investasi Yogyakarta (JITTEK Expo)
6. Stand Terbaik Batam IVEC 2018
7. Stand Terbaik Bidang Informasi Investasi Medan (MIATTEC Expo 2018)

8. Stand Terbaik Bidang Informasi Investasi Palembang (PIATTEC Palembang Investment, Agriculture, Tourism dan Trade Expo 2018)
9. Stand Terbaik Bidang informasi Investasi Malang (BIATTEX batu Investment, Agriculture Tourism dan Trade Expo 2018)

**K. HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN**

-

## BAB IV DEKONSENTRASI

### Dekonsentrasi yang diterima

1. Dasar Hukum

DPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)  
Nomor 065.01.159002/2018

2. Instansi Dekonsentrasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

3. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp349.420.500,00 atau 63,09 persen dari anggaran belanja sebesar Rp553.853.000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

URAIAN	2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	553.853.000	349.420.500	63,09 %
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>553.853.000</b>	<b>349.420.500</b>	<b>63,09 %</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	553.853.000	349.420.500	63,09 %

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 105 Perusahaan, adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 40 Perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 38,10%



## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **Kerjasama dengan pihak ketiga**

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
  - a. PT.Sucofindo (Persero) yang memberikan serangkaian jasa konsultansi dan audit untuk mewujudkan pelayanan prima dan Sertifikasi ISO 9001:2015.
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia.
2. Bidang Kerjasama
  - a. Sertifikasi ISO 9001:2015
  - b. Identifikasi/Kajian Potensi Sektoral oleh LPPM STIE Indonesia
  - c. Potensi Investasi Daerah untuk Percepatan pembangunan Perekonomian berbasis Sumberdaya Lokal
  - d. Identifikasi Usaha Kecil dan Menengah Potensial untuk meningkatkan Kemitraan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
  - e. Draft Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2025
  - f. Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2025
3. Nama Kegiatan
  - a. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001
  - b. Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah
  - c. Evaluasi Pelaksanaan RUPM
4. SKPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga  
DPMPSTSP bekerjasama dengan PT.Sucopindo dan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD

- a. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001 Rp120.000.000.
- b. Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah Rp490.000.000.
- c. Evaluasi Pelaksanaan RUPM Rp329.300.000.

6. Jangka Waktu Kerjasama

- a. Jadwal pelaksanaan kegiatan Pendampingan pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- b. Jadwal Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah yaitu pelaksanaan pekerjaan penelitian adalah selama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

7. Hasil (Output) dari Kerjasama

- a. Sertifikat ISO 9001:2015.
- b. Kegiatan Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah menghasilkan 2 kajian Potensi
- c. Dokumen Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2025.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2018

Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD terdiri dari :

1. Lampiran 1.1 : Tataran Pengambil Kebijakan

Tabel 6.1. Tataran Pengambil Kebijakan

Nomor IKK	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
39	Jumlah persetujuan investasi	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak 17 ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp21.750.612.100.000	Tercapai	Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola investasi Pemprov pada tahun 2018
32	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)	Realisasi Investasi thn 2017 sebesar Rp6.248.820.000.000 Realisasi Investasi 2018 sebesar Rp11.705.813.900.000	Meningkat 86.16 %	FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2017 dan 2018 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
	Promosi Investasi	Pelaksanaan Pameran, Expo, Forum Investasi	8 kali	Pelaksanaan pameran investasi dalam negeri
	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Aplikasi / Software Penunjang Urusan Penanaman Modal	aplikasi	Aplikasi yang dikelola oleh pusat dan daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)</li> <li>- SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)</li> <li>- SIMAPAN (Sistem Aplikasi Perizinan Online) dan Digital Signature</li> <li>- Aplikasi Reminder</li> <li>- BI (Business Intelegent)</li> <li>- API (Angka Pengenal Impor) Online</li> <li>- SIMKADA (Sistem Informasi Izin Kapal Daerah)</li> <li>-OSS (One Single Submisson)</li> </ul>

2. Lampiran 1.2 : Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 6.2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan

No	IKK	Rumus	Jenis Data	Satuan Elemen Data	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<p>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program</p> <p>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program</p>	1  1	100%
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----</p> <p>- yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Dokumen</li> <li>2. SOP Pengendalian Rekaman</li> <li>3. SOP Internal Audit</li> <li>4. SOP Pengendalian Produk yang tidak sesuai</li> <li>5. SOP Tindakan Perbaikan</li> <li>6. SOP Tindakan Manajemen</li> <li>7. SOP Administrasi Surat Masuk.</li> <li>8. SOP Administrasi Surat Keluar</li> <li>9. SOP Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas</li> </ol>	27 SOP	Ada



			<p>Penerbitan Perizinan dan Non perizinan dengan Peninjauan Lapangan tanpa pertimbangan teknis</p> <p>23. SOP Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan tanpa peninjauan Lapangan dengan Pertimbangan Teknis</p> <p>24. SOP Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan tanpa peninjauan lapangan tanpa pertimbangan teknis</p> <p>25. SOP Pelayanan secara elektronik</p> <p>26. SOP Penanganan Pengaduan</p> <p>27. SOP Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan</p>		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----	1	100%
			- PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	1	
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak ---	23	100%
			- Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	23	
5	Keberadaan jabatan fungsional	Ada atau tidak ada jabatan fungsional	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan	1 Jabatan Fungsional	Ada

	dalam struktur organisasi SKPD	dalam struktur organisasi SKPD	fungsional, -----. <b>Pranata Komputer</b>		
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak -----. personil	55	0,46%
			- Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil	12.017	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org.	23	100%
			- Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	23	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- org.	23	
			- Jabatan yang ada, sebanyak --- jbt.	23	
9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak --- -- jenis, yg terdiri dari: 1 RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ---- ---- program.	7	100%
			- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -- -----	7	

11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	7	100%
			- Program dalam RKA SKPD, sebanyak ---- - program.	7	
12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	7	100%
			- Program dalam DPA SKPD, sebanyak ---- - program.	7	
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, - ----	Rp 16.470.446.200	100,00%
			- Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	Rp 16.470.446.200	
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. - ----	Rp 102.572.000	0,62%
			- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	Rp 16.470.446.200	
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. --	Rp 404.511.300	4,79%
			- Total belanja barang jasa SKPD, sebesar Rp. -----	Rp 8.449.782.200	
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. --	Rp 404.511.300	2,64%
			- Total Belanja SKPD,	Rp	



			sebesar Rp.-----	15.297.242.798	
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)		Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	3 Jenis	Ada sebanyak 3 jenis
18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Barang (KIB) - Berita Acara Inventarisasi BMD	Ada	Ada
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ----- aset (Rp . . . ) - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ---- -- aset (Rp . . . )	Rp 399.402.513	1,02%
				Rp 39.305.324.109	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Lain-lain	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Website (media online)	Ada  Ada  Ada  Ada  Ada	Jumlah sebanyak 5 jenis.
21	Keberadaan	Ada atau tidak	Apabila Ada, sebutkan	Ada	Ada

	Survey Kepuasan Masyarakat	adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	survey kepuasan tentang -----	
--	----------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2018 dan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2018. Dengan demikian di dalam LKPJ dan LPPD ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 4 (empat) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021.

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar 9,2 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **11,7 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **127,73%**.

Pada indikator Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN ditargetkan meningkat 15%. Adapun realisasinya adalah sebesar **86,16%**, sehingga kinerja mencapai **574,4%**.

Pada indikator Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi ditargetkan sebesar 10,6 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **21,7 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **205,19%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan B dengan nilai 80. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 82,61**, sehingga kinerja mencapai **103,26%**.

## **B. SOLUSI MENGATASI KENDALA UNTUK PENINGKATAN KINERJA MENDATANG**

Dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan :

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelahitan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun didaerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini

meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.

8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

# LAMPIRAN

## REALISASI INVESTASI

INDIKATOR	TAHUN	SATUAN	CAPAIAN
- Penanaman Modal Asing (PMA)	2010	US\$	432,879,620
	2011	US\$	353,220,440
	2012	US\$	1,032,024,730
	2013	US\$	652,191,340
	2014	US\$	351,982,810
	2015	US\$	713,729,850
	2016	US\$	249,400,000
	2017	US\$	243,800,000
	<b>2018</b>	<b>US\$</b>	<b>129,147,300</b>
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2010	Rp	445,643,890,000
	2011	Rp	1,737,543,170,000
	2012	Rp	481,676,610,000
	2013	Rp	2,046,964,560,000
	2014	Rp	1,917,967,820,000
	2015	Rp	2,604,400,000,000
	2016	Rp	6,163,000,000,000
	2017	Rp	2,981,900,000,000
	<b>2018</b>	<b>Rp</b>	<b>9.975.240.000.000</b>
- Total Investasi			
(PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN)	2010	Rp	4,774,440,090,000
	2011	Rp	5,269,747,570,000
	2012	Rp	10,801,923,910,000
	2013	Rp	8,568,877,960,000
	2014	Rp	5,437,795,920,000
	2015	Rp	9,197,658,500,000
(PMA US\$1=Rp13.000 + PMDN)	2016	Rp	9,504,960,000,000
	2017	Rp	6,248,820,000,000
	<b>2018</b>	<b>Rp</b>	<b>11.705.813.900.000</b>
- Pertumbuhan Investasi	2011	%	10.37%
	2012	%	104.98%
	2013	%	-20.67%
	2014	%	-36.54%
	2015	%	58.83%
	2016	%	10.05%
	2017	%	-33.85%
	2018	%	87,32%

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**Ir. H. Nafarin, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620513 198903 1 001

## NILAI PERSETUJUAN INVESTASI / RENCANA INVESTASI

INDIKATOR	TAHUN	SATUAN	CAPAIAN
- Izin Investasi PMA	2010	US\$	696,332,300
	2011	US\$	464,999,150
	2012	US\$	1,439,532,490
	2013	US\$	71,313,800
	2014	US\$	333,767,670
	2015	US\$	854,925,400
	2016	US\$	235,599,500
	2017	US\$	357,406,400
- Izin Investasi PMDN	2010	Rp	956,589,410,000
	2011	Rp	11,415,368,000,000
	2012	Rp	21,018,178,000,000
	2013	Rp	7,316,319,450,000
	2014	Rp	17,624,807,310,000
	2015	Rp	1,501,468,400,000
	2016	Rp	5,962,929,900,000
	2017	Rp	7,890,479,600,000
- Total Rencana Investasi			
(PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN)	2010	Rp	7,919,912,410,000
	2011	Rp	16,065,359,500,000
	2012	Rp	35,413,502,900,000
	2013	Rp	8,029,457,450,000
	2014	Rp	20,962,484,010,000
	2015	Rp	10,050,722,400,000
(PMA US\$1=Rp13.000 + PMDN)	2016	Rp	9,025,723,400,000
	2017	Rp	12,536,762,800,000
	<b>2018</b>	<b>Rp</b>	<b>21.750.612.100.000</b>

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**Ir. H. Nafarin, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620513 198903 1 001



## REKAPITULASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIKELUARKAN (dalam unit)	1.139	3.618 (217,65%)	3.450 (-4,64%)	3.676 (6,55%)	2.982 (-18.87%)	2.464
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (dalam rupiah)	50.350.000	264.895.500	261.841.500	505.027.300 (target: 464.000.000) Capaian: 108,84%	370.663.300 (target: 464.000.000) Capaian: 91,75%	290.325.100 (target 404.000.000) Capaian: 71,86%

2018 Dengan rincian:

1. Bidang Perizinan Produksi dan Industri, sebanyak 1.616 buah
2. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial, sebanyak 831 buah
3. Bidang Perizinan Penanaman Modal, sebanyak 17 buah

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**Ir. H. Nafarin, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620513 198903 1 001